



WALI KOTA BITUNG
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN WALI KOTA
NOMOR 188.45/HKM/SK/ 7 /2025

TENTANG

PENETAPAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN
BERBASIS RISIKO TAHUN 2025

WALI KOTA BITUNG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Wali Kota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah dibantu oleh Inspektorat;
- b. bahwa untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS RISIKO TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Tahun 2025 yang selanjutnya disebut PKPT Berbasis Risiko sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan PKPT Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Inspektur melaporkan pelaksanaannya kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah Kota Bitung.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Daerah Kota Bitung.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bitung
pada tanggal 6 Januari 2025



WALI KOTA BITUNG,

MAURITS MANTIRI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA BITUNG,


BUDI KRISTANTO, S.H., M.H.
PEMBINA IV / a
NIP : 19761029 200312 1 004

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BITUNG
NOMOR 188.45/HKM/SK/ 7 /2025
TENTANG
PENETAPAN PROGRAM KERJA
PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS
RISIKO TAHUN 2025

PKPT Berbasis Risiko

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pengawasan intern oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Inspektorat sebagai unit kerja dengan fungsi pengawasan internal merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan reformasi birokrasi untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Kota Bitung untuk membangun kapasitas kelembagaan seluruh entitas unit kerja dalam rangka penyelenggaraan tugas fungsi yang sesuai dengan arahan tata pemerintahan yang baik. Adapun titik berat dari pemerintahan yang baik adalah pada upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberantasan korupsi secara terarah, sistematis dan terpadu. Reformasi mustahil akan terwujud jika tata pemerintahan masih memberikan peluang terhadap praktik Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) sehingga penyelarasan terhadap hasil pelaksanaan tugas pengawasan Inspektorat dapat memberikan keyakinan yang memadai atas pencapaian tujuan Pemerintah, memberikan peringatan dini terhadap potensi penyimpangan/kecurangan yang terjadi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah dan memberikan masukan yang dapat memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

Guna mewujudkan kondisi tersebut maka disusunlah Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2025 sebagai acuan/pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dalam satu tahun kedepan sehingga kegiatan Inspektorat dapat berjalan dengan tertib, terencana, terkoordinasi dan tidak tumpang tindih.

B. Tujuan dan Sasaran

PKPT Berbasis Risiko mengatur:

1. Kegiatan Pengawasan meliputi:

- a) kegiatan peningkatan kapabilitas APIP;
- b) kegiatan asistensi/pendampingan;
- c) kegiatan revidu;
- d) kegiatan monitoring dan evaluasi; dan
- e) kegiatan pemeriksaan.

2. Sasaran Pengawasan

Sasaran yang ingin diwujudkan dari PKPT Berbasis Risiko ini adalah pembinaan dan pengawasan Wali Kota terhadap perangkat daerah.

3. Fokus Pengawasan

Fokus pengawasan dibatasi pada pengawasan Wali Kota terhadap perangkat daerah meliputi:

- a) kinerja rutin pengawasan
 - 1) Pemeriksaan kinerja terhadap program/kegiatan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan/atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2025 dengan sasaran program/kegiatan yang memiliki risiko tinggi.
 - 2) Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, yaitu :
 - (a) pemeriksaan investigatif, dengan sasaran penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi; dan
 - (b) perhitungan kerugian keuangan Negara/Daerah, dengan sasaran kasus kerugian Negara yang dilimpahkan oleh aparat penegak hukum untuk dilakukan perhitungan kerugian keuangan Negara/Daerah.
 - 3) Pengawasan yang bersifat *mandatory* atau harus dilakukan oleh Inspektorat Daerah, meliputi :
 - (a) Reviu RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), dengan sasaran menjaga konsistensi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dengan RPJMD serta meyakinkan penyusunan RPJMD dan Renstra PD telah sesuai dengan kaidah perencanaan;
 - (b) Rencana dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran daerah tahunan (RKPD, Renja PD, KUA, PPAS dan RKA SKPD termasuk perubahannya), dengan sasaran menjaga konsistensi RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, menjaga konsistensi dokumen penganggaran daerah serta meyakinkan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran daerah tahunan telah sesuai dengan kaidah perencanaan;
 - (c) Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), dengan sasaran memberikan keyakinan secara terbatas bahwa tidak ada modifikasi material yang dilakukan dan laporan keuangan telah disajikan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan;
 - (d) Reviu laporan kinerja, dengan sasaran memberikan keyakinan secara terbatas bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas;
 - (e) Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), dengan sasaran memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan informasi kinerja dalam LPPD;
 - (f) Reviu Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, dengan sasaran meyakinkan Pemerintah Daerah dalam penyaluran DAK Fisik telah memenuhi persyaratan dokumen;

- (g) Reviu HPS dengan sasaran menilai kewajaran harga penawaran dan/atau kewajaran harga satuan, dasar untuk menetapkan dasar tertinggi penawaran yang sah dalam pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya;
 - (h) Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Daerah, dengan sasaran menilai keandalan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di pemerintah daerah;
 - (i) Monitoring penyerapan anggaran/pemeriksaan kas, dengan sasaran memberikan keyakinan bahwa target penyerapan anggaran dan pengelolaan kas daerah telah sesuai dengan perencanaan; dan
 - (j) Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP, dengan sasaran terhadap temuan pemeriksaan yang berlarut-larut penyelesaiannya.
- 4) Pengawasan Reformasi Birokrasi
- (a) Penilaian mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan sasaran meyakinkan data yang tertuang dalam dokumen akurat dan relevan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi; dan
 - (b) Asistensi pembangunan Reformasi Birokrasi dengan sasaran pendampingan kepada Perangkat Daerah dalam membangun sub area pengawasan, meliputi:
 - (1) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 - (2) Peningkatan Kapabilitas APIP;
 - (3) Penanganan benturan kepentingan; dan
 - (4) Penanganan pengaduan masyarakat.
- 5) Penegakan Integritas
- (a) Dukungan pelaksanaan survei penilaian integritas dengan sasaran meyakinkan kesiapan Pemerintah Daerah dan tersedianya alokasi anggaran secara memadai; dan
 - (b) Monitoring dan evaluasi aksi pencegahan korupsi dengan sasaran aksi pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan oleh KPK dan aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh Tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK).
- 6) Peningkatan Kapabilitas APIP
- (a) Penerapan Manajemen Risiko;
 - (b) Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko;
 - (c) Pemeriksaan DAK Fisik;
 - (d) Pendidikan Berjenjang Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintah Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) dan Auditor; dan
 - (e) Pendidikan Sertifikasi di Bidang Pengawasan Lainnya.

- b) Pengawasan Prioritas Nasional
- 1) Operasional sapu bersih pungutan liar (saber pungli), dengan sasaran menyakinkan pelayanan publik di masing-masing Pemerintah Daerah telah bersih dari pungutan liar.
 - 2) Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Inspektorat melakukan pemeriksaan bantuan operasional Sekolah Dasar dengan sasaran meyakinkan sekolah telah mengelola dana BOS, mulai dari penyaluran, penggunaan dan pertanggungjawaban telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 3) Zona Integritas dengan sasaran menuju wilayah bebas korupsi.
 - 4) PAN RB dengan sasaran menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi dan memegang teguh nilai dasar dan kode etik aparatur Negara.

4. PELAKSANAAN PKPT BERBASIS RISIKO

a) Pendekatan Pemeriksaan

Pemeriksaan reguler tematik dilaksanakan secara menyeluruh terhadap berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi aspek kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, efisiensi penggunaan sumber daya dan efektifitas dalam mencapai tujuan yang ditetapkan, penggunaan sumber daya melalui pemeriksaan dokumen, pemeriksaan fisik kegiatan, pengujian data, analisis prosedur, analisis hasil dan analisis kualitatif serta pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Inspektorat juga melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelayanan publik, pelaksanaan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota, pemeriksaan terhadap laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme serta pengaduan masyarakat yang dilakukan secara menyeluruh terhadap kasus yang terjadi yang meliputi penyebab, objek yang menjadi kasus, akibat, siapa yang terlibat dan aspek lain yang terkait dengan kasus yang terjadi.

b) Objek Pengawasan

1) Inspektorat	: 1	obrik
2) Dinas	: 22	obrik
3) Badan/Kantor	: 7	obrik
4) Sekretariat Daerah/Bagian	: 13	obrik
5) Sekretariat Dewan	: 1	obrik
6) Kecamatan	: 8	obrik
7) RSUD Bitung	: 1	obrik
8) Puskesmas	: 9	obrik
9) SMP Negeri/Swasta	: 20	obrik
10) SD Negeri/Swasta	: 20	obrik
11) Penerima bansos dan hibah yang diambil sampel	: 20	obrik
12) Badan Usaha Milik Daerah	: 3	obrik
Total	: 125	obrik

- c) **Struktur Organisasi**
Berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 29 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 29 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, struktur organisasi Inspektorat adalah:
- 1) Inspektur
 - 2) Sekretariat, yang membawahi:
Sub. Bagian Administrasi Umum dan Keuangan
 - 3) Inspektur Pembantu Wilayah, yang terdiri dari:
 - a. Inspektur Pembantu Wilayah I;
 - b. Inspektur Pembantu Wilayah II;
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah III;
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah IV; dan
 - e. Inspektur Pembantu Investigasi;
 - 4) Kelompok jabatan fungsional.
- d) **Sumber Daya Manusia (SDM)**
Jumlah tenaga pengawas untuk melaksanakan tugas pengawasan serta tugas kesekretariatan pada Inspektorat Daerah Kota Bitung sebagai berikut:
- | | |
|---------------------------|------------|
| a. Inspektur | : 1 orang |
| b. Sekretaris | : 1 orang |
| c. Inspektur Pembantu | : 5 orang |
| d. Kepala sub Bagian | : 1 orang |
| e. Staf administrasi: | |
| - bersertifikat JFA | : - orang |
| - bersertifikat PPUPD | : - orang |
| - belum bersertifikat JFA | : 5 orang |
| f. Tenaga Pengawas: | |
| - Bersertifikat JFA | : 10 orang |
| - Bersertifikat JF PPUPD | : 29 orang |
- e) **Anggaran**
Tahun anggaran 2025, Inspektorat Daerah Kota Bitung memperoleh alokasi anggaran yang bersumber dari APBD Kota Bitung sebesar Rp13.164.773.560,00 untuk melaksanakan 3 program, 11 kegiatan dan 36 sub kegiatan. Terdiri dari anggaran pengawasan Rp2.049.400.000,00 dan non pengawasan Rp11.115.373.560,00 terinci sebagai berikut:
- I. Pengawasan
1. Penyelenggaraan pengawasan internal Rp1.585.200.000,00
 - a. pengawasan kinerja Pemerintah Daerah Rp130.800.000,00
 - b. pengawasan keuangan Pemerintah Daerah Rp606.800.000,00
 - c. reviu laporan kinerja Rp367.800.000,00
 - d. reviu laporan keuangan Rp206.800.000,00
 - e. monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dan tindak lanjut hasil

3.	Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan	Rp16.000.000,00
a.	perumusan kebijakan teknis dibidang Pengawasan	Rp16.000.000,00
b.	perumusan kebijakan teknis dibidang fasilitasi pengawasan	Rp0
4.	Pendampingan dan asistensi	Rp172.400.000,00
a.	pendampingan dan asistensi urusan Pemerintah Daerah	Rp150.000.000,00
b.	pendampingan, asistensi, verifikasi, dan penilaian reformasi birokrasi	Rp7.500.000,00
c.	koordinasi, monitoring, evaluasi serta verifikasi pencegahan	Rp7.400.000,00
d.	pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakan integritas	Rp7.500.000,00
	Sub Jumlah I	Rp2.049.400.000,00
II.	Non Pengawasan	
1.	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat daerah	Rp1.271.000,00
a.	penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Rp1.271.000,00
b.	koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	Rp0
c.	evaluasi kinerja perangkat daerah	Rp0
2.	Administrasi keuangan Perangkat daerah	Rp10.473.262.560,00
a.	penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Rp10.473.262.560,00
b.	koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah	Rp0
c.	koordinasi dan penyusunan laporan bulanan/triwulan/semesteran perangkat daerah	Rp0
3.	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Rp218.080.000,00
a.	pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Rp172.000.000,00

- b. bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Rp46.080.000,00
- 4. Administrasi umum perangkat Daerah Rp69.131.000,00
 - a. penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Rp2.631.000,00
 - b. penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Rp0
 - c. penyediaan bahan logistik Rp0
 - d. penyediaan barang cetakan dan penggandaan Rp6.100.000,00
 - e. penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah Rp60.400.000,00
- 5. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah Rp0
 - a. pengadaan mebel Rp0
 - b. pengadaan peralatan dan mesin lainnya Rp0
 - c. pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya Rp0
- 6. Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah Rp181.139.000,00
 - a. penyediaan jasa surat menyurat menyurat Rp10.007.000,00
 - b. penyediaan jasa komunikasi, sumber daya dan listrik Rp69.500.000,00
 - c. penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Rp0
 - d. penyediaan jasa pelayanan umum kantor Rp101.632.000,00
- 7. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah Rp172.490.000,00
 - a. penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan Rp167.860.000,00
 - b. pemeliharaan mebel Rp0
 - c. pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya Rp4.630.000,00
 - d. pemeliharaan/rehabilitas sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya Rp0

- | | | |
|---------------|--|---------------------|
| c. | pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya | Rp4.630.000,00 |
| d. | pemeliharaan/rehabilitas sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya | Rp0 |
| Sub Jumlah II | | Rp11.115.373.560,00 |
| Total | | Rp13.164.773.560,00 |
- f) Pelaporan dan tindak lanjut
- 1) Pelaporan
- Keluaran dari kegiatan pemeriksaan adalah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Laporan harus disusun secara objektif, yaitu berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan pada saat pemeriksaan, dan rasional yaitu ada hubungan yang rasional antara temuan, penyebab dan rekomendasi, sehingga obrik dapat memahami apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki kinerja perangkat daerah/unit kerjanya.
- Untuk itu, LHP harus:
- dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada Pejabat yang memberi perintah serta pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - dibuat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah selesainya kegiatan atau pelaksanaan pemeriksaan dan segera disampaikan kepada yang berkepentingan secara tepat waktu. Hal ini dimaksudkan agar temuan dari hasil pemeriksaan tidak menjadi temuan yang basi, sehingga dapat segera ditindaklanjuti oleh perangkat daerah terperiksa sesuai dengan apa yang direkomendasikan;
 - disusun berdasarkan informasi dan data yang valid serta berdasarkan pada kode etik dan norma pengawasan; dan
 - laporan harus dapat menilai daya guna dan hasil guna.
- 2) Sistematika penulisan LHP
- Sistematika penulisan LHP didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- 3) Setiap perangkat daerah yang menjadi Obrik wajib melaksanakan tindak lanjut dari temuan hasil pemeriksaan sesuai dengan rekomendasi yang disampaikan dalam LHP. Pelaksanaan tindak lanjut maksimal 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya LHP oleh Obrik. Pelaksanaan tindak lanjut harus sesuai dengan rekomendasi dan didukung dengan bukti yang valid dan

- jumlah temuan yang sudah ditindaklanjuti tetapi belum sesuai dengan rekomendasi;
- jumlah temuan yang masih dalam proses penyelesaian; dan
- jumlah temuan yang belum ditindaklanjuti sesuai dengan saran/rekomendasi.

5. PEMBAGIAN OBJEK PENGAWASAN

No	Tim Pemeriksa	Objek Pemeriksaan	
1	Inspektur Pembantu Wilayah I	1	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
		2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		3	Badan Pendapatan Daerah
		4	Dinas Komunikasi dan Informatika
		5	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
		6	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		7	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
		8	Dinas Pariwisata
		9	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		10	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah
		11	Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah
		12	Perusahaan Umum Daerah Bangun Bitung
		13	Kecamatan Lembeh Selatan
		14	Puskesmas Tinombala
		15	Puskesmas Lembeh Selatan
		16	SMP Negeri dan Swasta
		17	SD Negeri dan Swasta
2	Inspektur Pembantu Wilayah II	1	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		2	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		3	Satuan Polisi Pamong Praja
		4	Inspektorat Daerah
		5	Dinas Ketenagakerjaan
		6	Dinas Perpustakaan
		7	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
		8	Dinas Sosial
		9	Rumah Sakit Umum Daerah Pratama
		10	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah

		11	Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah
		12	Bagian Kerja Sama Sekretariat Daerah
		13	Kecamatan Girian
		14	Kecamatan Ranowulu
		15	Puskesmas Girian
		16	Puskesmas Danowudu
		17	SMP Negeri dan Swasta
		18	SD Negeri dan Swasta
	3 Inspektur Pembantu Wilayah III	1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		2	Badan Keuangan dan Aset Daerah
		3	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		5	Dinas Perdagangan
		6	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
		7	Dinas Perikanan
		8	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
		9	Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah
		10	Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah
		11	Bagian Umum Sekretariat Daerah
		12	Kecamatan Matuari
		13	Kecamatan Aertembaga
		14	Kecamatan Madidir
		15	Puskesmas Sagerat
		16	Puskesmas Paceda
		17	SMP Negeri dan Swasta
		18	SD Negeri dan Swasta
4	Inspektur Pembantu Wilayah IV	1	Dinas Kesehatan
		2	Dinas Lingkungan Hidup
		3	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		4	Dinas Perhubungan
		5	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		6	Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah
		7	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah
		8	Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
		9	Bagian Hukum Sekretariat Daerah
		10	Kecamatan Lembeh Utara
		11	Kecamatan Maesa
		12	Puskesmas Lembeh Utara
		13	Puskesmas Aertembaga

		14	Puskesmas Bitung Barat
		15	Perusahaan Umum Daerah Air Minum Duasudara
		16	Perusahaan Umum Daerah Pasar
		17	SMP Negeri dan Swasta
		18	SD Negeri dan Swasta

II. PROGRAM PENGAWASAN

Penyusunan PKPT Inspektorat Daerah Kota Bitung menerapkan manajemen Audit Berbasis Risiko (Risk Based Audit), agar risiko yang dihadapi auditor dapat diminimalkan dan temuan hasil audit dapat dipertanggungjawabkan serta memberikan dukungan informasi mengenai risiko dalam menetapkan arah kebijakan pengawasan.

Penerapan manajemen audit berbasis risiko dimulai dengan penilaian risiko, yang mencakup identifikasi risiko dan analisis risiko. Untuk menentukan prioritas objek pengawasan faktor pemilihan yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Risiko (merupakan skor dari penilaian risiko sesuai *risk register* yang telah dievaluasi pada lembar pemahaman audit *universe program*)

No	Klasifikasi Risiko	Skala
1	Risiko sangat tinggi	5
2	Risiko tinggi	4
3	Risiko sedang	3
4	Risiko rendah	2
5	Risiko sangat rendah	1

2. Keuangan (adalah faktor pemilihan berdasar besaran anggaran program dibandingkan besaran anggaran OPD yang bersangkutan)

No	Jumlah	Skala
1	Sampai dengan 5% dari anggaran OPD	1
2	5,1 – 10% dari anggaran OPD	2
3	10,1 – 15% dari anggaran OPD	3
4	15,1 – 20% dari anggaran OPD	4
5	20,1 ke atas dari anggaran OPD	5

3. Faktor Kunci Keberhasilan (KSF)

No	Nilai LKIP	Skala
1	Bagian tidak penting	1
2	Bagian kurang penting	2
3	Bagian penting	3
4	Bagian sangat penting	4
5	Faktor utama	5

4. Dampak kepada masyarakat

No	Jumlah	Skala
1	Tidak berdampak	1
2	Berdampak kecil	2
3	Berdampak sedang	3
4	Berdampak tinggi	4
5	Berdampak sangat tinggi	5

5. Kompetensi Auditor

No	Jumlah	Skala
1	Tidak kompeten	1
2	Kompetensi rendah	2
3	Kompetensi sedang	3
4	Kompetensi tinggi	4
5	Kompetensi sangat tinggi	5

III. PENUTUP

Pengawasan yang efektif dan efisien tidak saja mampu menemukan kesalahan/pelanggaran yang terjadi dalam suatu program atau kegiatan akan tetapi juga mampu mendeteksi kemungkinan terjadinya pelanggaran/kesalahan yang akan terjadi dari suatu program atau kegiatan. Oleh karena itu, pengawasan harus dilakukan secara terarah, terkoordinir dan tidak tumpang tindih serta mampu merespon setiap permasalahan atau dinamika pengawasan yang mungkin terjadi.

Demikian PKPT Berbasis Risiko Tahun 2025 dibuat dalam rangka memberikan acuan bagi pelaksanaan pengawasan di lingkungan Pemerintah Kota Bitung.

**JADWAL PROGRAM KERJA PEMERIKSAAN / PENGAWASAN TAHUNAN
TAHUN PEMERIKSAAN/PENGAWASAN 2025**

NO	PRIORITAS PENGAWASAN	NAMA PERANGKAT DAERAH / UNIT KERJA	KATEGORI RESIKO	RUANG LINGKUP	SUSUNAN TIM		ANGGARAN WAKTU			ANGGARAN BIAYA			RMP	RPL	LHP	PERALATAN	KET.
					PERAN	JMLH	DK	LK	HP	DK	LK	TOTAL					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	PEMERIKSAAN UP DAN BP	8 BADAN, 22 DINAS, 2 SEKRETARIAT, 1 RSUD, DAN 8 KECAMATAN	TINGGI	TA. 2025	PJ	1	10	-	20	500,000	-	10,000,000	6-Jan-25	5-Feb-25	41	LAPTOP, ATK, PRINTER	
					WPJ	1	10		20	450,000	-	9,000,000					
					PT	1	10		20	400,000	-	8,000,000					
					KT	1	10		20	350,000	-	7,000,000					
					AT	9	10		20	300,000	-	54,000,000					
2	MONITORING TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK RI DAN APIP	DISESUAIKAN	SEDANG	TA. 2025	PJ	1	20	-	20	500,000	-	10,000,000	6-Jan-25	5-Feb-25	41	LAPTOP, ATK, PRINTER	
					WPJ	5	20		20	450,000	-	45,000,000					
					PT	5	20		20	400,000	-	40,000,000					
					KT	5	20		20	350,000	-	35,000,000					
					AT	8	20		20	300,000	-	48,000,000					
3	REVIU LK SKPD	8 BADAN, 22 DINAS, 2 SEKRETARIAT, 1 RSUD, DAN 8 KECAMATAN		TA. 2025	PJ	1	10	-	10	500,000	-	5,000,000	10-Feb-25	21-Feb-25	41		
					WKL PJ	5	10		10	450,000	-	22,500,000					
					PT	5	10		10	400,000	-	20,000,000					
					KT	5	10		10	350,000	-	17,500,000					
					AT	35	10		10	300,000	-	105,000,000					
4	MONITORING TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK DAN APIP	DISESUAIKAN	SEDANG	TA. 2025	PJ	1	10	-	10	500,000	-	5,000,000	10-Feb-25	21-Feb-25	1	LAPTOP, ATK, PRINTER	
					WPJ	1	10		10	450,000	-	4,500,000					
					PT	1	10		10	400,000	-	4,000,000					
					KT	1	10		10	350,000	-	3,500,000					
					AT	3	10		10	300,000	-	9,000,000					
5	PEMERIKSAAN DANA BOS TAHAP II TA. 2024	SD DAN SMP NEGERI SEWILAYAH KOTA BITUNG	TINGGI	TA. 2025	PJ	1	20	-	20	500,000	-	10,000,000	24-Feb-25	21-Mar-25	41	LAPTOP, ATK, PRINTER	
					WPJ	5	20		20	450,000	-	45,000,000					
					PT	5	20		20	400,000	-	40,000,000					
					KT	5	20		20	350,000	-	35,000,000					
					AT	8	20		20	300,000	-	48,000,000					
6	MONITORING TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK DAN APIP	DISESUAIKAN	SEDANG	TA. 2025	PJ	1	20	-	20	500,000	-	10,000,000	24-Feb-25	21-Mar-25	1	LAPTOP, ATK, PRINTER	
					WPJ	1	20		20	450,000	-	9,000,000					
					PT	1	20		20	400,000	-	8,000,000					
					KT	1	20		20	350,000	-	7,000,000					
					AT	3	20		20	300,000	-	18,000,000					
6	REVIU DAK TAHAP 3	9 PERANGKAT DAERAH	TINGGI	TA. 2025	PJ	1	5	-	5	500,000	-	2,500,000	3-Mar-25	07/03/2025	1	LAPTOP, ATK, PRINTER	
					WPJ	1	5		5	450,000	-	2,250,000					
					PT	1	5		5	400,000	-	2,000,000					
					KT	1	5		5	350,000	-	1,750,000					
					AT	4	5		5	300,000	-	6,000,000					
7	REVIU LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BITUNG	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BITUNG	SEDANG	TA. 2025	PJ	1	10	-	10	500,000	-	5,000,000	24-Mar-25	4-Apr-25	60	LAPTOP, ATK, PRINTER	
					WPJ	1	10		10	450,000	-	4,500,000					
					PT	1	10		10	400,000	-	4,000,000					
					KT	1	10		10	350,000	-	3,500,000					
					AT	5	10		10	300,000	-	15,000,000					

8	MONITORING TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK DAN APIP	DISESUAIKAN	SEDANG	TA. 2025	PJ	1	10	-	10	500,000	-	5,000,000	24-Mar-25	4-Apr-25	1	LAPTOP, ATK, PRINTER
					WPJ	1	10	-	10	450,000	-	4,500,000				
					PT	1	10	-	10	400,000	-	4,000,000				
					KT	1	10	-	10	350,000	-	3,500,000				
					AT	4	10	-	10	300,000	-	12,000,000				
9	REVIU LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BITUNG	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA BITUNG	SEDANG	TA. 2025	PJ	1	10	-	10	500,000	-	5,000,000	24-Mar-25	4-Apr-25	1	LAPTOP, ATK, PRINTER
					WPJ	1	10	-	10	450,000	-	4,500,000				
					PT	1	10	-	10	400,000	-	4,000,000				
					KT	5	10	-	10	350,000	-	17,500,000				
					AT	26	10	-	10	300,000	-	78,000,000				
10	REVIU LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KOTA BITUNG	BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KOTA BITUNG	SEDANG	TA. 2025	PJ	1	10	-	10	500,000	-	5,000,000	24-Mar-25	4-Apr-25	1	LAPTOP, ATK, PRINTER
					WPJ	1	10	-	10	450,000	-	4,500,000				
					PT	1	10	-	10	400,000	-	4,000,000				
					KT	1	10	-	10	350,000	-	3,500,000				
					AT	5	10	-	10	300,000	-	15,000,000				
11	REVIU PROSES PBJ	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BITUNG	SEDANG	TA. 2025	PJ	1	10	-	10	500,000	-	5,000,000	8-Apr-25	22-Apr-25	1	LAPTOP, ATK, PRINTER
					WPJ	1	10	-	10	450,000	-	4,500,000				
					PT	1	10	-	10	400,000	-	4,000,000				
					KT	1	10	-	10	350,000	-	3,500,000				
					AT	5	10	-	10	300,000	-	15,000,000				
12	REVIU DANA DAK TAHAP I TA. 2025	DINAS KESEHATAN, DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, DINAS PUPR, DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, DINAS PERIKANAN, BADAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB, DINAS PERPUSTAKAAN, DINAS PARIWISATA DAN DINAS PERDAGANGAN	SEDANG	TA. 2025	PJ	1	10	-	10	500,000	-	5,000,000	08/04/2024	30-Apr-24	1	LAPTOP, ATK, PRINTER
					WPJ	1	10	-	10	450,000	-	4,500,000				
					PT	1	10	-	10	400,000	-	4,000,000				
					KT	1	10	-	10	350,000	-	3,500,000				
					AT	4	10	-	10	300,000	-	12,000,000				
13	PEMERIKSAAN DANA FISIK DAN DAK NON FISIK DAK TA 2024	DINAS KESEHATAN, DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, DINAS PUPR, DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, DINAS PERIKANAN, BADAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB, DINAS PERPUSTAKAAN, DINAS PARIWISATA DAN DINAS PERDAGANGAN	TINGGI	TA. 2025	PJ	1	10	-	10	500,000	-	5,000,000	23/04/2025	9-May-25	3	LAPTOP, ATK, PRINTER
					WPJ	5	10	-	10	450,000	-	22,500,000				
					PT	5	10	-	10	400,000	-	20,000,000				
					KT	5	10	-	10	350,000	-	17,500,000				
					AT	10	10	-	10	300,000	-	30,000,000				
14	PEMERIKSAAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL	BADAN KESBANGPOL, DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, DINAS SOSIAL, BAGIAN KESRA, BKAD, DINAS PERDAGANGAN, BPBD, DINAS PARIWISATA, DINAS PERKIMTAN, DINAS PUTR, DINAS PERIKANAN, 8 KECAMATAN	TINGGI	TA. 2025	PJ	1	10	-	10	500,000	-	5,000,000	14/05/2025	27-May-25	15	LAPTOP, ATK, PRINTER
					WPJ	5	10	-	10	450,000	-	22,500,000				
					PT	5	10	-	10	400,000	-	20,000,000				
					KT	5	10	-	10	350,000	-	17,500,000				
					AT	10	10	-	10	300,000	-	30,000,000				

15	EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS PEMERINTAH	8 BADAN, 22 DINAS, 2 SEKRETARIAT, 1 RSUD, DAN 8 KECAMATAN	TA. 2025	PJ	1	10	10	500,000	-	5,000,000	2-Jun-25	13-Jun-25	41	LAPTOP, ATK, PRINTER
				WKL PJ	5	10	10	450,000	-	22,500,000				
				PT	5	10	10	400,000	-	20,000,000				
				KT	5	10	10	350,000	-	17,500,000				
				AT	35	10	10	300,000	-	105,000,000				
		1 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA BITUNG	TINGGI											
		2 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA BITUNG	TINGGI											
		3 DINAS KESEHATAN KOTA BITUNG	TINGGI											
		4 DINAS PERDAGANGAN KOTA BITUNG	TINGGI											
		5 DINAS PERHUBUNGAN KOTA BITUNG	TINGGI											
		6 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BITUNG	TINGGI											
		7 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BITUNG	TINGGI											
		8 BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BITUNG	SEDANG											
		9 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BITUNG	SEDANG											
		10 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA	SEDANG											
		11 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BITUNG	SEDANG											
		12 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA KOTA BITUNG	SEDANG											
		13 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	SEDANG											
		14 DINAS SOSIAL KOTA BITUNG	SEDANG											
		15 INSPEKTORAT KOTA BITUNG	SEDANG											
		16 DINAS PARIWISATA KOTA BITUNG	SEDANG											
		17 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA BITUNG	SEDANG											
		18 DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BITUNG	SEDANG											
		19 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BITUNG	SEDANG											
		20 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BITUNG	SEDANG											
		21 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BITUNG	SEDANG											
		22 DINAS PERIKANAN KOTA BITUNG	SEDANG											
		23 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA BITUNG	SEDANG											
		24 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLARAGA KOTA BITUNG	SEDANG											
		25 DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA BITUNG	SEDANG											
16	REVIU DANA DAK TAHAP II TA. 2025	DINAS KESEHATAN, DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, DINAS PUTR, DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN, DINAS PERIKANAN, BADAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB, DINAS PERPUSTAKAAN, DINAS PARIWISATA DAN DINAS PERDAGANGAN	TA. 2025	PJ	1	5	5	500,000	-	2,500,000	02/06/2025	6-Jun-25	1	LAPTOP, ATK, PRINTER
				WPJ	1	5	5	450,000	-	2,250,000				
				PT	1	5	5	400,000	-	2,000,000				
				KT	1	5	5	350,000	-	1,750,000				
				AT	4	5	5	300,000	-	6,000,000				

17	REVIU RKPD	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BITUNG	SEDANG	TA. 2025	PJ	1	5	-	5	500,000	-	2,500,000	09/06/2025	13-Jun-25	1	LAPTOP, ATK, PRINTER	
					WPJ	1	5	-	5	450,000	-	2,250,000					
					PT	1	5	-	5	400,000	-	2,000,000					
					KT	1	5	-	5	350,000	-	1,750,000					
					AT	5	5	-	5	300,000	-	1,500,000					
18	PEMERIKSAAN BELANJA SEMESTER I TA. 2025	8 BADAN, 22 DINAS, 2 SEKRETARIAT, 1 RSUD, DAN 8 KECAMATAN	SEDANG	TA. 2025	PJ	1	20	-	20	500,000	-	10,000,000	18-Jun-25	16-Jul-25	41	LAPTOP, ATK, PRINTER	
					WPJ	5	20	-	20	450,000	-	45,000,000					
					PT	5	20	-	20	400,000	-	40,000,000					
					KT	5	20	-	20	350,000	-	35,000,000					
					AT	8	20	-	20	300,000	-	48,000,000					
19	REVIU RENJA TA. 2026	8 BADAN, 22 DINAS, 2 SEKRETARIAT, 1 RSUD, DAN 8 KECAMATAN	SEDANG	TA. 2025	PJ	1	14	-	14	500,000	-	7,000,000	17-Jul-25	30-Jul-25	41	LAPTOP, ATK, PRINTER	
					WPJ	5	14	-	14	450,000	-	31,500,000					
					PT	5	14	-	14	400,000	-	28,000,000					
					KT	5	14	-	14	350,000	-	24,500,000					
					AT	8	14	-	14	300,000	-	33,600,000					
20	PEMERIKSAAN KIBAH DAN BANTUAN SOSIAL	BADAN KESBANGPOL, DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, DINAS SOSIAL, BAGIAN KESRA, BKAD, DINAS PERDAGANGAN, BPBD, DINAS PARIWISATA, DINAS PERKIMTAN, DINAS PUTR, DINAS PERKANAN, 8 KECAMATAN	TINGGI	TA. 2025	PJ	1	10	-	10	500,000	-	5,000,000	11/08/2025	14-Aug-25	15	LAPTOP, ATK, PRINTER	
					WPJ	5	10	-	10	450,000	-	22,500,000					
					PT	5	10	-	10	400,000	-	20,000,000					
					KT	5	10	-	10	350,000	-	17,500,000					
					AT	10	10	-	10	300,000	-	30,000,000					
21	MONITORING TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK DAN APIP	DISESUAIKAN	SEDANG	TA. 2025	PJ	1	10	-	10	500,000	-	5,000,000	01/08/2025	14-Aug-25	1	LAPTOP, ATK, PRINTER	
					WPJ	1	10	-	10	450,000	-	4,500,000					
					PT	1	10	-	10	400,000	-	4,000,000					
					KT	1	10	-	10	350,000	-	3,500,000					
					AT	5	10	-	10	300,000	-	15,000,000					
22	REVIU PENYERAPAN ANGGARAN SEMESTER I	BKAD DAN BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	SEDANG	TA. 2025	PJ	1	5	-	5	500,000	-	2,500,000	01/08/2025	7-Aug-25	1	LAPTOP, ATK, PRINTER	
					WPJ	1	5	-	5	450,000	-	2,250,000					
					PT	1	5	-	5	400,000	-	2,000,000					
					KT	1	5	-	5	350,000	-	1,750,000					
					AT	3	5	-	5	300,000	-	4,500,000					
23	PEMERIKSAAN PENGELOLAAN BUMD SEMESTER I	PERUMDA AIR MINUM DUASUDARA, PERUMDA BANGUN BITUNG DAN PERUMDA PASAR	TINGGI	TA. 2025	PJ	1	10	-	10	500,000	-	5,000,000	15-Aug-25	28-Aug-25	3	LAPTOP, ATK, PRINTER	
					WPJ	3	10	-	10	450,000	-	13,500,000					
					PT	3	10	-	10	400,000	-	12,000,000					
					KT	3	10	-	10	350,000	-	10,500,000					
					AT	35	10	-	10	300,000	-	105,000,000					

24	MONITORING TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK DAN APIP	DISESUAIKAN	SEDANG	TA. 2025	PJ	1	10	-	10	500,000	-	5,000,000	15-Aug-25	28-Aug-25	1	LAPTOP, ATK, PRINTER
					WPJ	1	10	-	10	450,000	-	4,500,000				
					PT	1	10	-	10	400,000	-	4,000,000				
					KT	1	10	-	10	350,000	-	3,500,000				
					AT	4	10	-	10	300,000	-	12,000,000				
25	PEMERIKSAAN PENDAPATAN TA. 2025	PENGELOLA PENDAPATAN	TINGGI	TA. 2025	PJ	1	10	-	10	500,000	-	5,000,000	1-Sep-25	12-Sep-25	11	LAPTOP, ATK, PRINTER
					WPJ	5	10	-	10	450,000	-	22,500,000				
					PT	5	10	-	10	400,000	-	20,000,000				
					KT	10	10	-	10	350,000	-	35,000,000				
					AT	25	10	-	10	300,000	-	75,000,000				
26	MONITORING TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK DAN APIP	DISESUAIKAN	SEDANG	TA. 2025	PJ	1	20	-	20	500,000	-	10,000,000	1-Sep-25	12-Sep-25	1	LAPTOP, ATK, PRINTER
					WPJ	1	20	-	20	450,000	-	9,000,000				
					PT	1	20	-	20	400,000	-	8,000,000				
					KT	1	20	-	20	350,000	-	7,000,000				
					AT	4	20	-	20	300,000	-	24,000,000				
27	REVIU PERUBAHAN RKPD	BADAN PERENCANAAN PEMBANGNAN DAERAH KOTA BITUNG	SEDANG	TA. 2025	PJ	1	5	-	5	500,000	-	2,500,000	1-Sep-25	5-Sep-25	1	LAPTOP, ATK, PRINTER
					WPJ	1	5	-	5	450,000	-	2,250,000				
					PT	1	5	-	5	400,000	-	2,000,000				
					KT	1	5	-	5	350,000	-	1,750,000				
					AT	5	5	-	5	300,000	-	7,500,000				
28	REVIU PERUBAHAN KUA-PPAS	8 BADAN, 22 DINAS, 2 SEKRETARIAT, 1 RSUD, DAN 8 KECAMATAN	SEDANG	TA. 2025	PJ	1	10	-	10	500,000	-	5,000,000	8-Sep-25	12-Sep-25	1	LAPTOP, ATK, PRINTER
					WPJ	1	10	-	10	450,000	-	4,500,000				
					PT	1	10	-	10	400,000	-	4,000,000				
					KT	1	10	-	10	350,000	-	3,500,000				
					AT	47	10	-	10	300,000	-	141,000,000				
29	REVIU PERUBAHAN RKA	8 BADAN, 22 DINAS, 2 SEKRETARIAT, 1 RSUD, DAN 8 KECAMATAN	SEDANG	TA. 2025	PJ	1	10	-	10	500,000	-	5,000,000	15-Sep-25	19-Sep-25	1	LAPTOP, ATK, PRINTER
					WPJ	1	10	-	10	450,000	-	4,500,000				
					PT	1	10	-	10	400,000	-	4,000,000				
					KT	1	10	-	10	350,000	-	3,500,000				
					AT	47	10	-	10	300,000	-	141,000,000				
30	PEMERIKSAAN DANA BOS SD & SMP NEGERI DI KOTA BITUNG TAHAP I DAN II TA. 2025	SD DAN SMP NEGERI SEWILAYAH KOTA BITUNG	TINGGI	TA. 2025	PJ	1	20	-	20	500,000	-	10,000,000	22-Sep-25	17-Oct-25	40	LAPTOP, ATK, PRINTER
					WPJ	1	20	-	20	450,000	-	9,000,000				
					PT	1	20	-	20	400,000	-	8,000,000				
					KT	1	20	-	20	350,000	-	7,000,000				
					AT	5	20	-	20	300,000	-	30,000,000				

31	MONITORING TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK DAN APIP	DISESUAIKAN	SEDANG	TA. 2025	PJ	1	20	-	20	500,000	-	10,000,000	22-Sep-25	17-Oct-25	1	LAPTOP, ATK, PRINTER
					WPJ	1	20	-	20	450,000	-	9,000,000				
					PT	1	20	-	20	400,000	-	8,000,000				
					KT	1	20	-	20	350,000	-	7,000,000				
					AT	4	20	-	20	300,000	-	24,000,000				
32	PEMERIKSAAN DANA BOS SD & SMP SWASTA DI KOTA BITUNG TAHAP I DAN II TA. 2025	SMP DAN SD NEGERI DI KOTA BITUNG	TINGGI	TA. 2025	PJ	1	20	-	20	500,000	-	10,000,000	20-Oct-25	14-Nov-25	40	LAPTOP, ATK, PRINTER
					WKL PJ	5	20	-	20	450,000	-	45,000,000				
					PT	5	20	-	20	400,000	-	40,000,000				
					KT	10	20	-	20	350,000	-	70,000,000				
					AT	8	20	-	20	300,000	-	48,000,000				
33	MONITORING TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK DAN APIP	DISESUAIKAN	SEDANG	TA. 2025	PJ	1	20	-	20	500,000	-	10,000,000	20-Oct-25	14-Nov-25	1	LAPTOP, ATK, PRINTER
					WPJ	1	20	-	20	450,000	-	9,000,000				
					PT	1	20	-	20	400,000	-	8,000,000				
					KT	1	20	-	20	350,000	-	7,000,000				
					AT	4	20	-	20	300,000	-	24,000,000				
34	EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN INTEREN PEMERINTAH			TA. 2025	PJ	1	10	-	10	500,000	-	5,000,000	DISESUAIKAN	DISESUAIKAN	1	LAPTOP, ATK, PRINTER
					WPJ	5	10	-	10	450,000	-	22,500,000				
					PT	5	10	-	10	400,000	-	20,000,000				
					KT	10	10	-	10	350,000	-	35,000,000				
					AT	35	10	-	10	300,000	-	105,000,000				
	1 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BITUNG	TINGGI							0							
	2 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BITUNG	TINGGI							0							
	3 DINAS KESEHATAN KOTA BITUNG	TINGGI							0							
	4 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA BITUNG	TINGGI							0							
	5 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA	TINGGI							0							
	6 BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BITUNG	SEDANG							0							
	7 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BITUNG	SEDANG							0							
	8 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA	SEDANG							0							
	9 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATANGAN SIPIL KOTA BITUNG	SEDANG							0							
	10 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BITUNG	SEDANG							0							
	11 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA	SEDANG							0							
	12 KECAMATAN MADDIR KOTA BITUNG	SEDANG							0							
	13 KECAMATAN MAESA KOTA BITUNG	SEDANG							0							
	14 INSPEKTORAT DAERAH KOTA BITUNG	KECIL							0							
	15 SEKRETARIAT DAERAH KOTA BITUNG (BAGIAN HUKUM)	KECIL							0							
	16 SEKRETARIAT DAERAH KOTA BITUNG (BAGIAN ORGANISASI)	KECIL							0							

35	PEMERIKSAAN BELANJA SEMESTER II TA. 2025	8 BADAN, 22 DINAS, 2 SEKRETARIAT, 1 RSUD, DAN 8 KECAMATAN	TINGGI	TA. 2025	PJ	1	20	20	500,000	-	10,000,000	11-Nov-25	12-Dec-25	41	LAPTOP, ATK, PRINTER	
					WPJ	5	20	20	450,000	-	45,000,000					
					PT	5	20	20	400,000	-	40,000,000					
					KT	5	20	20	350,000	-	35,000,000					
					AT	8	20	20	300,000	-	48,000,000					
36	MONITORING TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK DAN APIP	DISESUAIKAN	SEDANG	TA. 2025	PJ	1	20	20	500,000	-	10,000,000	11-Nov-25	12-Dec-25	1	LAPTOP, ATK, PRINTER	
					WPJ	1	20	20	450,000	-	9,000,000					
					PT	1	20	20	400,000	-	8,000,000					
					KT	1	20	20	350,000	-	7,000,000					
					AT	4	20	20	300,000	-	24,000,000					
37	PEMERIKSAAN DAN PEMERIKSAAN KELURAHAN	8 KECAMATAN	TINGGI	TA. 2025	PJ	1	10	10	500,000	-	5,000,000	DISESUAIKAN	DISESUAIKAN	8	LAPTOP, ATK, PRINTER	
					WPJ	5	10	10	450,000	-	22,500,000					
					PT	10	10	10	400,000	-	40,000,000					
					KT	10	10	10	350,000	-	35,000,000					
					AT	16	10	10	300,000	-	48,000,000					
38	AUDIT PENGELOLAAN BMD	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BITUNG	TINGGI	TA. 2025	PJ	1	5	5	500,000	-	2,500,000	DISESUAIKAN	DISESUAIKAN	1	LAPTOP, ATK, PRINTER	
					WPJ	1	5	5	450,000	-	2,250,000					
					PT	1	5	5	400,000	-	2,000,000					
					KT	1	5	5	350,000	-	1,750,000					
					AT	5	5	5	300,000	-	1,500,000					
39	MONITORING TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK DAN APIP	DISESUAIKAN	TINGGI	TA. 2025	PJ	1	5	5	500,000	-	2,500,000	DISESUAIKAN	DISESUAIKAN	1	LAPTOP, ATK, PRINTER	
					WPJ	1	5	5	450,000	-	2,250,000					
					PT	1	5	5	400,000	-	2,000,000					
					KT	1	5	5	350,000	-	1,750,000					
					AT	5	5	5	300,000	-	1,500,000					
40	REVISI SSP, ASB DAN HSPK TA. 2026	BKAD KOTA BITUNG	SEDANG	TA. 2025	PJ	1	5	5	500,000	-	2,500,000	DISESUAIKAN	DISESUAIKAN	1	LAPTOP, ATK, PRINTER	
					WPJ	1	5	5	450,000	-	2,250,000					
					PT	1	5	5	400,000	-	2,000,000					
					KT	1	5	5	350,000	-	1,750,000					
					AT	8	5	5	300,000	-	12,000,000					
41	REVISI PRA RKA TA. 2026	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BITUNG	SEDANG	TA. 2025	WPJ	1	5	5	500,000	-	2,500,000	DISESUAIKAN	DISESUAIKAN		LAPTOP, ATK, PRINTER	
					PT	10	5	5	450,000	-	11,250,000					
					KT	10	5	5	400,000	-	20,000,000					
					AT	10	5	5	350,000	-	17,500,000					
					AT	20	5	5	300,000	-	30,000,000					

42	REVIU KUA-PPAS TA. 2026	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BITUNG	SEDANG	TA. 2025	PJ	1	5			5	500,000	-	2,500,000	DISESUAIKAN		LAPTOP, ATK, PRINTER
					WPJ	5	5			5	450,000	-	11,250,000			
					PT	10	5			5	400,000	-	20,000,000			
					KT	10	5			5	350,000	-	17,500,000			
					AT	20	5			5	300,000	-	30,000,000			
43					PJ	1	5			5	500,000	-	2,500,000			
					WPJ	5	5			5	450,000	-	11,250,000			
					PT	10	5			5	400,000	-	20,000,000			
					KT	10	5			5	350,000	-	17,500,000			
					AT	16	5			5	300,000	-	24,000,000			
44	PEMERIKSAAN DANA BTT TA. 2024 DAN TA. 2025	BPBD, DINAS SOSIAL DINAS KESEHATAN, BADAN KESBANGPOL DAN BKAD KOTA BITUNG	TINGGI	TA. 2025	PJ	1	5			5	500,000	-	2,500,000	DISESUAIKAN	5	LAPTOP, ATK, PRINTER
					WPJ	5	5			5	450,000	-	11,250,000			
					PT	10	5			5	400,000	-	20,000,000			
					KT	10	5			5	350,000	-	17,500,000			
					AT	15	5			5	300,000	-	24,000,000			
45	PEMERIKSAAN DANA BOS SMP DAN SD NEGERISWASTA TAHAP III TA. 2025	SMP dan SD DI KOTA BITUNG	TINGGI	TA. 2025	PJ	1	18			18	500,000	-	9,000,000			
					WPJ	5	18			18	450,000	-	40,500,000			
					PT	5	18			18	400,000	-	36,000,000	23/12/2024	65	LAPTOP, ATK, PRINTER
					KT	10	18			18	350,000	-	63,000,000	28-Nov-24		
					AT	8	18			18	300,000	-	43,200,000			
46	PEMERIKSAAN BELANJA SEMESTER 2	37 PERANGKAT DAERAH 12 BAGIAN, 8 KECAMATAN	TINGGI	TA. 2025	PJ	1	18			18	500,000	-	9,000,000			
					WPJ	5	18			18	450,000	-	40,500,000			
					PT	5	18			18	400,000	-	36,000,000	28-Nov-24	41	LAPTOP, ATK, PRINTER
					KT	10	18			18	350,000	-	63,000,000			
					AT	8	18			18	300,000	-	43,200,000			
47	MONITORING TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK DAN APD	DISESUAIKAN	SEDANG	TA. 2025	PJ	1	18			18	500,000	-	9,000,000			
					WPJ	1	18			18	450,000	-	6,100,000			
					PT	1	18			18	400,000	-	7,200,000	23/12/2024	1	LAPTOP, ATK, PRINTER
					KT	1	18			18	350,000	-	6,300,000			
					AT	4	18			18	300,000	-	21,600,000			
48	AUDIT IT PBJ	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BITUNG	TINGGI	TA. 2025	PJ	1	5			5	500,000	-	2,500,000	DISESUAIKAN	1	LAPTOP, ATK, PRINTER
					WPJ	1	5			5	450,000	-	2,250,000			
					PT	1	5			5	400,000	-	2,000,000			
					KT	1	5			5	350,000	-	1,750,000			
					AT	5	5			5	300,000	-	7,500,000			
49	REVIU P3DN DAN PENYERAPAN ANGGARAN	PEMERINTAH KOTA BITUNG	SEDANG	TA. 2025	PJ	1	5			5	500,000	-	2,500,000			
					WPJ	1	5			5	450,000	-	2,250,000			
					PT	1	5			5	400,000	-	2,000,000	DISESUAIKAN	1	LAPTOP, ATK, PRINTER
					KT	1	5			5	350,000	-	1,750,000			
					AT	5	5			5	300,000	-	7,500,000			
50	MONITORING INFLASI DAERAH	PEMERINTAH KOTA BITUNG	SEDANG	TA. 2025	PJ	1	5			5	500,000	-	2,500,000			
					WPJ	1	5			5	450,000	-	2,250,000			
					PT	1	5			5	400,000	-	2,000,000	DISESUAIKAN	1	LAPTOP, ATK, PRINTER
					KT	1	5			5	350,000	-	1,750,000			
					AT	5	5			5	300,000	-	7,500,000			

51	AUDIT KEPEGAWAIAN	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH KOTA BITUNG	TINGGI	TA. 2025	PJ	1	5	5	500,000	2,500,000	DISESUAIKAN	DISESUAIKAN	1	LAPTOP, ATK, PRINTER
					WPJ	1	5	5	450,000	2,250,000				
					PT	1	5	5	400,000	2,000,000				
					KT	1	5	5	350,000	1,750,000				
					AT	5	5	5	300,000	1,500,000				
52	REVIU ROTASI DAN MUTASI ASN	BKPSDMD KOTA BITUNG	SEDANG	TA. 2025	PJ	1	5	5	500,000	2,500,000	DISESUAIKAN	DISESUAIKAN	1	LAPTOP, ATK, PRINTER
					WPJ	1	5	5	450,000	2,250,000				
					PT	1	5	5	400,000	2,000,000				
					KT	1	5	5	350,000	1,750,000				
					AT	8	5	5	300,000	12,000,000				
53	REVIU TATA KELOLA BMD	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BITUNG	SEDANG	TA. 2025	PJ	1	5	5	500,000	2,500,000	DISESUAIKAN	DISESUAIKAN	1	LAPTOP, ATK, PRINTER
					WPJ	1	5	5	450,000	2,250,000				
					PT	1	5	5	400,000	2,000,000				
					KT	1	5	5	350,000	1,750,000				
					AT	8	5	5	300,000	12,000,000				
54	MONITORING IEPK	PEMERINTAH KOTA BITUNG	SEDANG	TA. 2025	PJ	1	5	5	500,000	2,500,000	DISESUAIKAN	DISESUAIKAN	1	LAPTOP, ATK, PRINTER
					WPJ	1	5	5	450,000	2,250,000				
					PT	1	5	5	400,000	2,000,000				
					KT	1	5	5	350,000	1,750,000				
					AT	5	5	5	300,000	1,500,000				
55	AUDIT PENGELOLAAN BMD	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BITUNG	TINGGI	TA. 2025	PJ	1	5	5	500,000	2,500,000	DISESUAIKAN	DISESUAIKAN	1	LAPTOP, ATK, PRINTER
					WPJ	1	5	5	450,000	2,250,000				
					PT	1	5	5	400,000	2,000,000				
					KT	1	5	5	350,000	1,750,000				
					AT	5	5	5	300,000	1,500,000				
56	AUDIT KINERJA	DISESUAIKAN	TINGGI	TA. 2025	PJ	1	5	5	500,000	2,500,000	DISESUAIKAN	DISESUAIKAN	1	LAPTOP, ATK, PRINTER
					WPJ	1	5	5	450,000	2,250,000				
					PT	1	5	5	400,000	2,000,000				
					KT	1	5	5	350,000	1,750,000				
					AT	8	5	5	300,000	12,000,000				
57	PERMINTAAN PENDAMPINGAN	DISESUAIKAN	RENDAH	TA. 2025	PJ	1	5	5	500,000	2,500,000	DISESUAIKAN	DISESUAIKAN	1	LAPTOP, ATK, PRINTER
					WPJ	5	5	5	450,000	11,250,000				
					PT	5	5	5	400,000	10,000,000				
					KT	5	5	5	350,000	8,750,000				
					AT	26	5	5	300,000	39,000,000				
58	EVALUASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN BERBASIS GENDER (RESPONSIVE GENDER)	DISESUAIKAN	SEDANG	TA. 2025	PJ	1	5	5	500,000	2,500,000	DISESUAIKAN	DISESUAIKAN	1	LAPTOP, ATK, PRINTER
					WPJ	1	5	5	450,000	2,250,000				
					PT	1	5	5	400,000	2,000,000				
					KT	1	5	5	350,000	1,750,000				
					AT	5	5	5	300,000	1,500,000				
59	PENGAWASAN DAN REVIU PEN	DINAS KESEHATAN, DINAS PERDAGANGAN, DINAS PUTR DAN DINAS PERKIMTAN	TINGGI	TA. 2025	PJ	1	5	5	500,000	2,500,000	DISESUAIKAN	DISESUAIKAN	1	LAPTOP, ATK, PRINTER
					WPJ	1	5	5	450,000	2,250,000				
					PT	1	5	5	400,000	2,000,000				
					KT	1	5	5	350,000	1,750,000				
					AT	5	5	5	300,000	1,500,000				

60	PROBITY AUDIT	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BITUNG	TINGGI	TA. 2025	PJ	1	10		10	500,000		5,000,000	DISESUAIKAN	DISESUAIKAN	1	LAPTOP, ATK, PRINTER	
					WPJ	1	10		10	450,000		4,500,000					
					PT	1	10		10	400,000		4,000,000					
					KT	1	10		10	350,000		3,500,000					
					AT	5	10		10	300,000		15,000,000					
61	REVIJ PENYERAPAN ANGGARAN SEMESTER 2	DISESUAIKAN	SEDANG	TA. 2025	PJ	1	5		5	500,000		2,500,000	DISESUAIKAN	DISESUAIKAN	1	LAPTOP, ATK, PRINTER	
					WPJ	1	5		5	450,000		2,250,000					
					PT	1	5		5	400,000		2,000,000					
					KT	1	5		5	350,000		1,750,000					
					AT	5	5		5	300,000		7,500,000					
62	PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU	DISESUAIKAN	TINGGI	TA. 2025	PJ	1	20		20	500,000		10,000,000	DISESUAIKAN	DISESUAIKAN	1	LAPTOP, ATK, PRINTER	
					WPJ	1	20		20	450,000		9,000,000					
					PT	1	20		20	400,000		8,000,000					
					KT	1	20		20	350,000		7,000,000					
					AT	7	20		20	300,000		42,000,000					
63	AUDIT INVESTIGASI	DISESUAIKAN	TINGGI	TA. 2025	PJ	1	10		10	500,000		5,000,000	DISESUAIKAN	DISESUAIKAN	1	LAPTOP, ATK, PRINTER	
					WPJ	1	10		10	450,000		4,500,000					
					PT	1	10		10	400,000		4,000,000					
					KT	1	10		10	350,000		3,500,000					
					AT	8	10		10	300,000		24,000,000					
64	REVIJ HPS	DISESUAIKAN	SEDANG	TA. 2025	PJ	1	5		5	500,000		2,500,000	DISESUAIKAN	DISESUAIKAN	1	LAPTOP, ATK, PRINTER	
					WPJ	1	5		5	450,000		2,250,000					
					PT	1	5		5	400,000		2,000,000					
					KT	1	5		5	350,000		1,750,000					
					AT	5	5		5	300,000		7,500,000					
65	EVALUASI TINDAK LANJUT ATAS MOU DENGAN APH	DISESUAIKAN	SEDANG	TA. 2025	PJ	1	5		5	500,000		2,500,000	DISESUAIKAN	DISESUAIKAN	1	LAPTOP, ATK, PRINTER	
					WPJ	1	5		5	450,000		2,250,000					
					PT	1	5		5	400,000		2,000,000					
					KT	1	5		5	350,000		1,750,000					
					AT	5	5		5	300,000		7,500,000					
66	PENANGANAN LAPORAN GRATIFIKASI	DISESUAIKAN	TINGGI	TA. 2025	PJ	1	5		5	500,000		2,500,000	DISESUAIKAN	DISESUAIKAN	1	LAPTOP, ATK, PRINTER	
					WPJ	1	5		5	450,000		2,250,000					
					PT	1	5		5	400,000		2,000,000					
					KT	1	5		5	350,000		1,750,000					
					AT	5	5		5	300,000		7,500,000					
67	MONITORING DAN EVALUASI AKSI PENCEGAHAN KORUPSI	DISESUAIKAN	SEDANG	TA. 2025	PJ	1	5		5	500,000		2,500,000	DISESUAIKAN	DISESUAIKAN	1	LAPTOP, ATK, PRINTER	
					WPJ	1	5		5	450,000		2,250,000					
					PT	1	5		5	400,000		2,000,000					
					KT	1	5		5	350,000		1,750,000					
					AT	5	5		5	300,000		7,500,000					

68	VERIFIKASI PELAPORAN AKSI PENCEGAHAN KORUPSI	DISESUAIKAN	TINGGI	TA, 2025	PJ	1	5	5	500,000	2,500,000	DISESUAIKAN	DISESUAIKAN	1	LAPTOP, ATK, PRINTER
					WPJ	1	5	5	450,000	2,250,000				
					PT	1	5	5	400,000	2,000,000				
					KT	1	5	5	350,000	1,750,000				
					AT	5	5	5	300,000	7,500,000				
69	SURVEY PENILAIAN INTEGRITAS (SPI)	DISESUAIKAN	TINGGI	TA, 2025	PJ	1	5	5	500,000	2,500,000	DISESUAIKAN	DISESUAIKAN	1	LAPTOP, ATK, PRINTER
					WPJ	1	5	5	450,000	2,250,000				
					PT	1	5	5	400,000	2,000,000				
					KT	1	5	5	350,000	1,750,000				
					AT	5	5	5	300,000	7,500,000				
70	PENILAIAN MANDIRI REFORMASI BIROKRASI	DISESUAIKAN	TINGGI	TA, 2025	PJ	1	5	5	500,000	2,500,000	DISESUAIKAN	DISESUAIKAN	1	LAPTOP, ATK, PRINTER
					WPJ	1	5	5	450,000	2,250,000				
					PT	1	5	5	400,000	2,000,000				
					KT	1	5	5	350,000	1,750,000				
					AT	5	5	5	300,000	7,500,000				
71	EVALUASI MANAJEMEN RESIKO	DISESUAIKAN	SEDANG	TA, 2025	PJ	1	5	5	500,000	2,500,000	DISESUAIKAN	DISESUAIKAN	1	LAPTOP, ATK, PRINTER
					WPJ	1	5	5	450,000	2,250,000				
					PT	1	5	5	400,000	2,000,000				
					KT	1	5	5	350,000	1,750,000				
					AT	8	5	5	300,000	12,000,000				
72	REVIU DAN PENYERAPAN P3DN	DISESUAIKAN	SEDANG	TA, 2025	PJ	1	5	5	500,000	2,500,000	DISESUAIKAN	DISESUAIKAN	1	LAPTOP, ATK, PRINTER
					WPJ	1	5	5	450,000	2,250,000				
					PT	1	5	5	400,000	2,000,000				
					KT	1	5	5	350,000	1,750,000				
					AT	8	5	5	300,000	12,000,000				
73	REVIU KEBIJAKAN/REGULASI KEPALA DAERAH	DISESUAIKAN	SEDANG	TA, 2025	PJ	1	5	5	500,000	2,500,000	DISESUAIKAN	DISESUAIKAN	1	LAPTOP, ATK, PRINTER
					WPJ	1	5	5	450,000	2,250,000				
					PT	1	5	5	400,000	2,000,000				
					KT	1	5	5	350,000	1,750,000				
					AT	8	5	5	300,000	12,000,000				
74	MONITORING PEMBAGIAN MAKAN SIANG GRATIS SD DAN SMP SE KOTA BITUNG	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	SEDANG	TA, 2025	PJ	1	10	10	500,000	5,000,000	DISESUAIKAN	DISESUAIKAN	1	LAPTOP, ATK, PRINTER
					WPJ	1	10	10	450,000	4,500,000				
					PT	1	10	10	400,000	4,000,000				
					KT	1	10	10	350,000	3,500,000				
					AT	8	10	10	300,000	24,000,000				

75	PEMUTAKHIRAN DATA	DISESUAIKAN							0			DISESUAIKAN				LAPTOP, ATK, PRINTER
76	PROGRAM PELATIHAN MANDIRI (PKM)	DISESUAIKAN							0			DISESUAIKAN				LAPTOP, ATK, PRINTER
77	BIMBINGAN TEKNIS (BIMTEK)	DISESUAIKAN							0			DISESUAIKAN				LAPTOP, ATK, PRINTER
78	SOSIALISASI	DISESUAIKAN							0			DISESUAIKAN				LAPTOP, ATK, PRINTER

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA BITUNG,


BUDI KRISTIARNO, S.H., M.H.,
PEMBINA IV / a
NIP : 19761029 200312 1 004



WALI KOTA BITUNG,


MAURITS MANTIRI